

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Edisi kedua, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- A. Mukthie Fadjat. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Good governance dan Independensi Birokrasi*. Makalah. Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Lukman Hakim Saifuddin. 2000. *Catatan Tentang Persepsi Masyarakat Mengenai Good governance Di Indonesia*. Makalah. Disampaikan Dalam Forum Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan *Public Good governance*, Bappenas RI, 24 -11 – 2000.
- Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Politik di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Ni"matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang. 2001. *Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Itjen Depdagri, Jakarta.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.F. Marbun, dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- , 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.



- Syamsuddin Haris. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI, Jakarta
- Syamsul Bachri, 2007, *Bahan Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, PPS. Unhas. Makassar 2007
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta..
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. "Governance for sustainable human development".
- Widjaja A.W, 1998, *Titik berat Otonomi Daerah pada tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarna Surya. Adisubrata. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. CV Aneka Ilmu. Semarang.
- Yudoyono, Bambang, 2001, *Otonomi Daerah desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Sinar Harapan, Jakarta.

#### **Makalah/Jurnal Ilmiah/Materi Kuliah:**

- Bhenyamin Hoessin. 2002. *Tentang Daerah*. Makalah, Fisip UI, Jakarta, 2002, hlm.3-7
- Dadang Solihin. 2000. *Anti Corruption And Good governance*. Makalah. Disampaikan Pada Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan *Public Good governance* Bappenas 24 Agustus 2000.
- Emil Salim, *Good Governance dan Warga Masyarakat*, Media Transparansi Edisi 15 Desember 1999.
- Irtanto, *Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA No. 46/XXV/III/ 2002, UII, Yogyakarta, 2002, H.274
- Jimly Asshiddigie. 2002. *Pengorganisasian Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif*, Artikel dalam Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 1 tahun 2002.
- Philipus M. Hadjon. 2004. *Implikasi UU No. 9 Tahun 2004 Terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Sjahrir. 2001. *Good governance di Indonesia Masih Utopia Tinjauan Kritis Good governance*. Makalah. Jakarta.

#### **Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31  
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan  
Negara.  
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tata Cara  
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengawasan  
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 1996 tentang Pedoman  
Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran  
Departemen Dalam Negeri  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan  
Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk melakukan  
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten dan  
Kota di Wilayah kerjanya.  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam  
Negeri.

**Informan :**

Abbas Allauddin. Ketua PGRI Kabupaten Gowa. 08 Maret 2020.  
Andy Azis Peter. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan  
Pemerintah Kabupaten Gowa. 08 April 2020.  
Fatahuddin Jarung. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Gowa. 01 April 2020.  
Kaharuddin Muji. LSM/NGO Wakil Fondation Kabupaten Gowa. 07 Maret  
2020.  
Mallingkai Maknun. Tokoh Masyarakat Kabupaten Gowa. 09 April 2020.  
Mappaujung. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa. 05 Maret. 2020.  
Muslimin Mile. Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. 28 Maret 2020.  
Nurliah. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Gowa. 10 April 2020.  
Rewa. Ketua Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. 28 Maret 2020.  
driyanto Z. Tokoh Pemuda Kabupaten Gowa. 09 April 2020.



Rosita. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. 01 April 2020.

Salam. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. 08 Maret 2020.

Tarmo. Kepala Sekolah SMAN 2 Gowa. 07 Maret 2020.

Wahyuni. Salah Satu Orang Tua Peserta Didik. 05 Maret 2020.

Zulfiadi. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. 01 April 2020.



# LAMPIRAN



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Mesjid Raya No.30 Telp. (0411) 887344 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
NOMOR: 800/671/D/016/VI/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

Nama : **Dr. Salam, M. Pd**  
NIP : 19630628 198903 1 002  
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/ IV-b  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Tenri Bilang Radisyah Melati**  
NIM : B12116327  
Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Hukum Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. Pengayoman Komp. Bougenville Blok E No. 2  
Judul : Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian/ pengambilan data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dari tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 10 April 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 13 April 2020

**KEPALA DINAS,**

**DR. SALAM, M. Pd**  
Pangkat Pembina Tingkat I  
NIP. 19630628 198903 1 002



Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Arsip.

